

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang pertarungan kepentingan dalam sebuah perumusan kebijakan publik, Raperda Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro. Berbeda dengan studi tentang *public policy making* pada umumnya, studi ini berusaha melihat proses perumusan kebijakan publik sebagai sebuah kontestasi politik dan pertarungan kepentingan. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus gagal disahkannya kebijakan Raperda Dana Abadi Migas pada tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengkesplorasi konflik kepentingan, proses tawar menawar, hingga upaya membangun koalisi di antara para aktor yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan publik Raperda Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengkerangkai penelitian ini, penulis menggunakan teori *Advocacy Coalition Framework*, Paul A. Sabatier. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi tiga komponen dari struktur pembuatan kebijakan, yaitu parameter yang relatif stabil, subsistem kebijakan dan peristiwa eksternal di luar sistem. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan penelusuran data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Kabupaten Bojonegoro, laporan kegiatan, maupun artikel dan tulisan di surat kabar. Hasil riset menunjukkan bahwa gagal disahkannya kebijakan Dana Abadi bukan hanya disebabkan karena alasan teknis penulisan belaka, melainkan karena adanya pertarungan kepentingan yang terjadi antara pihak eksekutif (Bupati dan Pemkab) dengan pihak legislatif (PDIP dan Gerindra). Pertarungan kepentingan yang terjadi digambarkan dengan terbaginya para aktor (*policy participants*) ke dalam dua koalisi besar (Pro dan Kontra). Ditemukannya *policy beliefs* yang sama pada setiap koalisi menggambarkan adanya satu kesepakatan bersama dari hasil negosiasi kepentingan individu yang dilakukan oleh masing-masing aktor yang terlibat. Adanya faktor eksternal pilkada 2018 yang pada akhirnya merubah prioritas dan arah kepentingan setiap aktor juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam proses pengesahan sangat dilatarbelakangi oleh alasan yang bersifat politis, bukan hanya karena kesalahan teknis-administratif.

Kata kunci: Pertarungan kepentingan, Perumusan kebijakan publik, Dana Abadi Migas